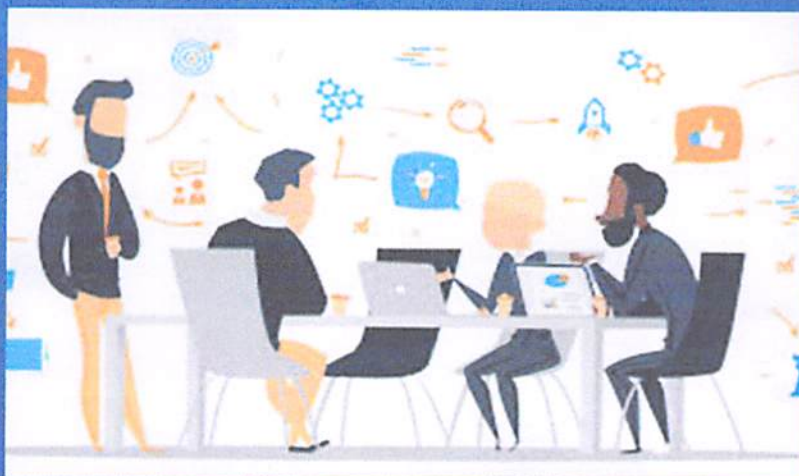




# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

## BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

### SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



## KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dapat diselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2022. Kinerja pemerintahan baik pada level daerah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pada skala nasional saat ini dihadapkan suatu kondisi yang harus dicapai, yaitu menerapkan paradigma baru pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, yang di dalamnya mencakup akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, tanggap, orientasi terhadap konsensus, partisipatif, efektifitas, efisien dan visi strategis yang kesemuanya ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun dan disampaikan sebagai pelaksanaan kewajiban Biro untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Biro. Laporan Kinerja juga bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis atau target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2022. Adapun yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Biro Administrasi Pembangunan tahun 2022. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja merupakan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sepenuhnya kami menyadari, bahwa kualitas laporan ini belum sesuai dengan yang diharapkan hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan program dan kegiatan serta komitmen seluruh pegawai Biro dalam mengimplementasikan prinsip akuntabel

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Faktor eksternal yang bersifat sebagai fungsi kontrol untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Biro. Selain itu target indikator kinerja yang ditentukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu Biro Administrasi Pembangunan selalu berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan.

Hasil dari penulisan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada seluruh bagian di lingkungan Biro tentang aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing serta sejauhmana capaian kinerja dapat diwujudkan pada tahun 2022 dan menjadi acuan dimasa mendatang untuk mewujudkan peningkatan kinerja.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Padang, 16 Januari 2023

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**



**H E F D I, SH M. Si**

Pembina Utama Muda,  
NIP. 19640915 199003 1 007

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sebagai bagian komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja pemerintah menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sekaligus merupakan gambaran dari pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan dan sasaran organisasi.

Memenuhi maksud tersebut diatas Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 yang merupakan penerapan tahun kedua dari Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini disusun untuk mewujudkan kewajiban Biro guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi Biro dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Tahun 2022 menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan sasaran strategis yang menjadi target pelaksanaan kegiatan
2. Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dengan hasil capaian kinerja sebesar 106,66%
3. Pencapaian sasaran strategis 1 (satu) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja *yaitu Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan* dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 106,66% yang rinciannya terdiri dari Persentase Perangkat Daerah ( OPD Provinsi ) yang tertib administrasi pelaksanaan

pembangunan capaian kinerjanya sebesar 107,98%. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan capaian kinerjanya sebesar 109,89%.

4. Usaha yang dilakukan dalam rangka dalam rangka mewujudkan indikator kinerja terhadap ***Persentase Perangkat Daerah Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan*** adalah dengan menerapkan penggunaan aplikasi Simbangda bagi seluruh OPD Provinsi agar dapat terlaksananya tertib administrasi pembangunan yang mana seluruh OPD melakukan tahapan upload dokumen sebagai data dukung dan ketepatan waktu melaksanakan tertib pelaksanaan administrasi pembangunan.
5. Pencapaian sasaran strategis 2 (dua) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja yaitu ***Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja*** dengan capaian kinerja sebesar 104,19%
6. Pencapaian sasaran strategis 3 (tiga) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja yaitu ***Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi*** dengan capaian kinerja sebesar 110,28%

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Gambaran umum Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau/Biro Administrasi Pembangunan .....	1
1.2 Permasalahan Utama.....	14
 BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	15
2.1 Perencanaan Strategis .....	15
2.2 Perjanjian Kinerja .....	19
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja .....	21
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja .....	22
3.3 Capaian Kinerja Masing Masing Bagian .....	39
 BAB IV PENUTUP .....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Permasalahan dan Kendala .....	58

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1      Tingkat Pendidikan Pegawai Biro .....	7
Tabel 1.2      Daftar Aset Biro Administrasi Pembangunan.....	9
Tabel 2.1      Ikhtisar PK Tahun 2022 Biro Administrasi Pemabangunan .....	19
Tabel 2.2.2    Program dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.....	19
Tabel 3.1.1    Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	22
Tabel 3.2.1    Perjanjian Kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah .....	23
Tabel 3.2.2    Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD kondisi realisasi sampai 31 Desember 2022 .....	25
Tabel 3.2.3    Dana Alokasi Khusus Fisik Prov. Sumatera Barat Tahun 2022.....	26
Tabel 3.3.4    Dana Alokasi Khusus Fisik Kab/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2022 .....	27
Tabel 3.2.5    Dana Dekonsentrasi dan tugas Perbantuan Sumatera Barat Tahun 2022 .....	28
Tabel 3.2.6    Anggaran Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah .....	30
Tabel 3.2.7    Perjanjian Kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah .....	31
Tabel 3.2.8    Rekapitulasi Laporan Realisasi APBD Kab/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 kondisi 31 Desember 2022 .....	32
Tabel 3.2.9    Anggaran Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.....	34
Tabel 3.2.10   Perjanjian Kinerja Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan .....	35
Tabel 3.2.11   Anggaran Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan .....	37
Tabel 3.2.12   Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2022.....	38
Tabel 3.3.1    Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	40
Tabel 3.3.2    Statistika Evidence Januari sampai Desember 2022 .....	42
Tabel 3.3.3    Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 dan 2022 .....	46
Tabel 3.3.4    Realisasi Anggaran Program Administrasi Pembangunan Tahun 2022 .....	47

Tabel 3.3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 .....	48
Tabel 3.3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	49
Tabel 3.3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 2 Tahun 2021 dan 2022 .....	51
Tabel 3.3.8	Rekapitulasi Kuisisioner .....	54
Tabel 3.3.9	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi .....	55
Tabel 3.3.10	Hasil Kuisisioner .....	56

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 GAMBARAN UMUM BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Biro Administrasi Pembangunan adalah salah satu unit kerja yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro ini merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang pengendalian pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terbentuknya Biro Administrasi Pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai sebuah instansi pemerintahan lainnya, dimana salah satu wujud dari azas penyelenggaraan *good governance* maka Biro Administrasi Pembangunan wajib membuat dan menyajikan laporan akuntabilitas kinerjanya setiap tahun. Laporan akuntabilitas ini disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan amanah Peraturan perundangan berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sementara tujuan dari penyusunan LAKIP Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder

atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat. Selain sebagai bahan evaluasi, laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja serta Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Pembinaan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas yaitu *“membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah,*

*Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan”.*

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut

- 1) penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- 2) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- 3) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

### **1.1.2 STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Biro Administrasi Pembangunan**

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian sebagai berikut :

- 1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

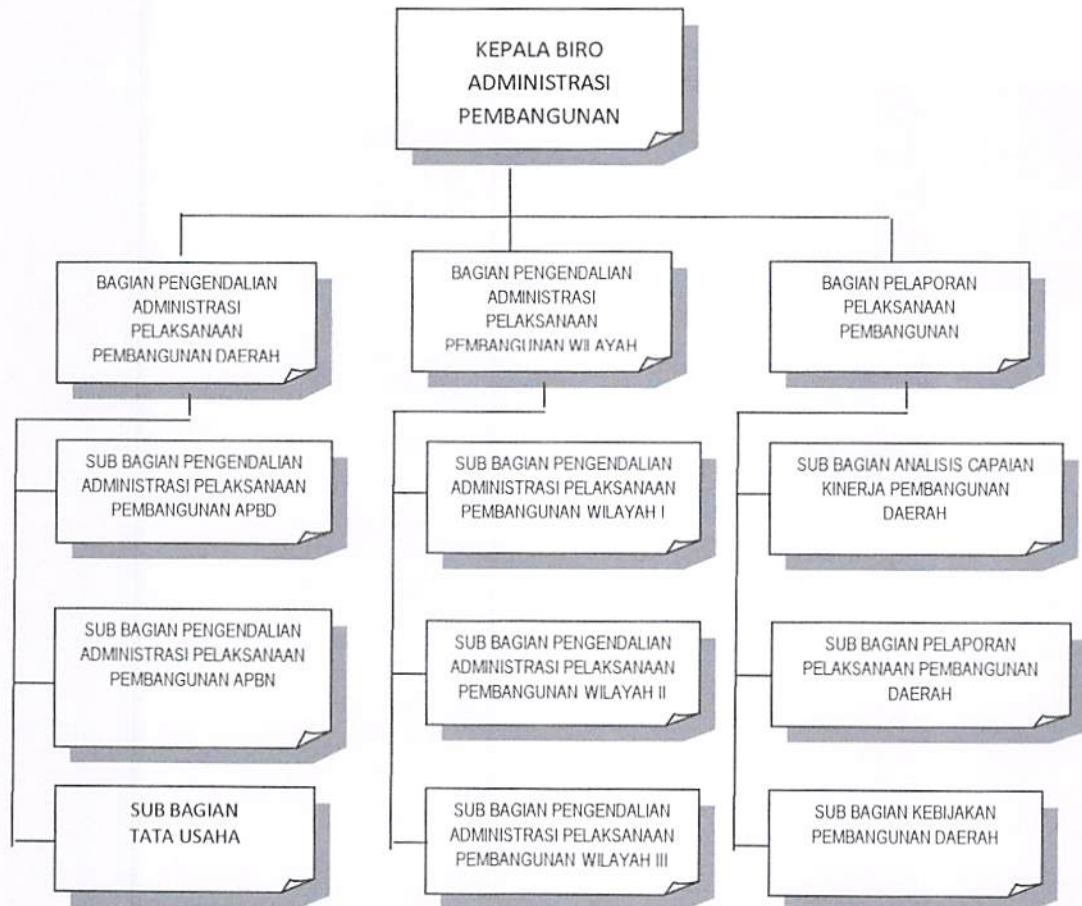
- a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD;
- b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

**2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

- a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
- b. Sub Bagian Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
- c. Sub Bagian Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.

- 3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan,** mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
- a. Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
  - b. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
  - c. Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah.

**Bagan 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan**  
**STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
 (Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021)



### 1.1.3 SUMBER DAYA SKPD

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

#### A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan kinerja yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2022, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki Aparatur Sipil Negara sebanyak 24 orang dan 5 Non Aparatur Sipil Negara dengan total seluruh pegawai 29 orang. Adapun rincian sebagai berikut 5 orang struktural, 6 orang fungsional penyetaraan, 13 orang fungsional umum. Selain itu Biro Administrasi Pembangunan dibantu 4 orang tenaga kontrak dan 1 orang tenaga IT kontrak. Dari 4 orang tenaga kontrak tersebut 2 orang tenaga kontrak dari Biro Umum yang diperbantukan pada Biro Administrasi Pembangunan. Pada tabel 1.1. dan grafik 1.1. berikut dapat dilihat kekuatan pegawai di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel 1.1.**

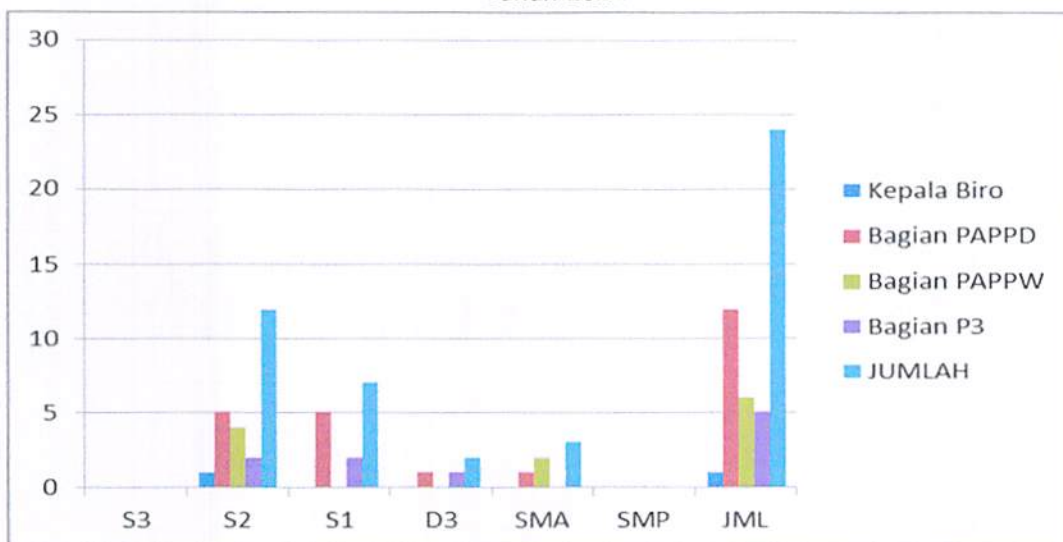
**Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2022**

No.	URAIAN	PENDIDIKAN						JML
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1.	Kepala Biro	0	1	0	0	0	0	1
2.	Bagian PAPPD	0	5	5	1	1	0	12
3.	Bagian PAPPW	0	4	0	0	2	0	6
4.	Bagian P3	0	2	2	1	0	0	5
	JUMLAH	0	12	7	2	3	0	24

*Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumatera Barat*

Berdasarkan tabel 1.1. di atas dapat dilihat, pada tahun 2022 pegawai di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat 50% berpendidikan S2 atau sebanyak 12 orang, 29.17% berpendidikan S1 atau sebanyak 7 orang, 8.33% berpendidikan D3 atau sebanyak 2 orang dan 12.5% berpendidikan SMU atau sebanyak 3 orang. Pegawai tersebut tersebar di 3 bagian yang ada dilingkungan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 1.1.  
Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan  
Tahun 2022



## B. Aset

Aset yang diserahkan pengelolaannya kepada Biro untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro dan Rantau per 31 Desember 2022 tercatat sebagaimana berikut.



UNIT BIDANG : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
PROVINSI : SUMATERA BARAT

Tabel 1.2

DAFTAR ASET BIRO  
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE LOWASI: 11.01.13.00.400110.00000.000000.XXXX

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	TAMBAH PEROLEHAN	MERK/ANALOG	UKURAN	HARGA SATUAN	JURBAH BARANG	NOMOR BARANG	NOMOR METER	NOMOR PUSUK	NOMOR SP-B	Nilai Perolehan	Asuransi Asuransi	Nilai Buku	REMAN
117	1.1.2.05.02.06.002	Smart TV	1	2022	Samsung	55 inch	12.075.000,00	3	-	-	-	-	12.075.000,00	-	12.075.000,00	-
118	1.1.2.05.02.05.008	laptop	1	2022	Lenovo	-	15.877.500,00	2	-	-	-	-	15.877.500,00	-	15.877.500,00	-
119	1.1.2.05.02.05.047	Perakam Suara	1	2022	SONY FPM 4710	-	1.155.000,00	3	-	-	-	-	1.155.000,00	-	1.155.000,00	-
120	1.1.2.10.01.02.001	Komputer P.C	1	2022	Asus All in One	-	14.706.000,00	8	-	-	-	-	14.706.000,00	-	14.706.000,00	-
121	1.1.2.10.01.02.009	Printer	1	2022	Samsung Galaxy	-	18.999.000,00	3	-	-	-	-	18.999.000,00	-	18.999.000,00	-
122	1.1.2.10.02.03.003	Printer	1	2022	Epson L1270	-	6.090.340,00	3	-	-	-	-	6.090.340,00	-	6.090.340,00	-
123	1.1.2.02.02.04.001	SPRINKLER MOTOR	1	2022	Yamaha	-	34.800.000,00	1	YMH65J600HKA17886	081811254223	BA 1825 D	-	34.800.000,00	-	34.800.000,00	-
124	1.1.2.05.02.01.002	Motor Honda Bocar	1	2022	Yamaha	-	1.048.000,00	1	-	-	-	-	1.048.000,00	-	1.048.000,00	-
125	1.1.2.05.02.04.007	Brankas Besi	1	2022	President	-	1.500.000,00	2	-	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
126	1.1.2.05.02.04.001	Lemari Besi	1	2024	President	-	634.500,00	2	-	-	-	-	634.500,00	-	634.500,00	-
127	1.1.2.05.02.04.006	Filing Besi	1	2024	Mulang	-	385.000,00	2	-	-	-	-	385.000,00	-	385.000,00	-
128	1.1.2.05.02.01.002	Motor Honda Bocar	1	2026	-	-	385.866,67	1	-	-	-	-	385.866,67	-	385.866,67	-
129	1.1.2.05.02.01.001	Motor Honda Bocar	1	2026	-	-	385.866,67	1	-	-	-	-	385.866,67	-	385.866,67	-
130	1.1.2.05.02.01.008	Motor Honda Bocar	1	2026	-	-	7.100.000,00	2	-	-	-	-	7.100.000,00	-	7.100.000,00	-
131	1.1.2.05.02.03.001	Monitor	1	2026	Samsung Full	-	2.200.000,00	1	-	-	-	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
132	1.1.2.05.02.02.017	Printer	1	2027	HP L1102	-	1.500.000,00	1	-	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
133	1.1.2.10.02.02.013	Printer	1	2027	HP L1102	-	1.500.000,00	1	-	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
134	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
135	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
136	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
137	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
138	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
139	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
140	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
141	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
142	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
143	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
144	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
145	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
146	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
147	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
148	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
149	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
150	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
151	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
152	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
153	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
154	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
155	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
156	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
157	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
158	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
159	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
160	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
161	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
162	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
163	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
164	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
165	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
166	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
167	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
168	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
169	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
170	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
171	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
172	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
173	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
174	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
175	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
176	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
177	1.1.2.05.02.06.013	Komputer D-gal	1	2028	Canon	-	3.500.000,00	1	-	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	REKISTER	TAHUN PEROLEHAN	MERK/MODEL	UKURAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BARANG	NOMOR RAHIBRA	NOMOR MESIN	NOMOR POLISI	NOMOR BANG.	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PEROLEHAN	NILAI BUKU	BESAN
26	3.2.2.05.02.06.03	Skema Digital	1	2015	Canon 700 D	-	9.515.000,00	1	-	-	-	-	9.515.000,00	9.515.000,00	-	-
28	3.2.2.06.01.01.043	UPS	2	2015	UPS CA 3600 VA/800 W	-	7.700.000,00	1	-	-	-	-	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-
30	3.2.2.06.01.02.048	Projector Mini	1	2015	Sony	-	17.800.000,00	1	-	-	-	-	17.800.000,00	17.800.000,00	-	-
31	3.2.2.10.01.02.001	Komputer PC	1	2015	Lenovo H32DE DC	-	8.140.000,00	1	-	-	-	-	8.140.000,00	8.140.000,00	-	-
32	3.2.2.10.02.02.017	Printer	1	2015	Epson L310	-	2.202.500,00	1	-	-	-	-	2.202.500,00	2.202.500,00	-	-
33	3.2.2.10.02.02.017	Printer	1	2015	HP P40 400 M40N	-	4.950.000,00	1	-	-	-	-	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-
34	3.2.2.05.02.06.077	Stat. Fergama TV	1	2016	-	-	2.600.000,00	1	-	-	-	-	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-
35	3.2.2.05.01.06.001	Komputer PC	1	2016	-	-	6.415.000,00	1	-	-	-	-	6.415.000,00	6.415.000,00	-	-
36	3.2.2.10.01.02.001	Komputer PC	2	2016	H32DE DC	-	10.285.000,00	1	-	-	-	-	10.285.000,00	10.285.000,00	-	-
37	3.2.2.10.01.02.001	Printer	1	2016	HP	-	8.419.000,00	1	-	-	-	-	8.419.000,00	8.419.000,00	-	-
38	3.2.2.05.01.01.007	Mein Tls. Luth.	2	2017	Bosch	-	2.850.000,00	1	-	-	-	-	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-
39	3.2.2.05.01.01.007	Mein Telecopy	1	2017	Samsung	-	24.300.000,00	1	-	-	-	-	24.300.000,00	24.300.000,00	-	-
40	3.2.2.05.01.06.010	Mein Penghantar Nemas	1	2017	25A18ender	-	9.510.000,00	1	-	-	-	-	9.510.000,00	9.510.000,00	-	-
41	3.2.2.05.02.01.001	Meja Bantawa	1	2017	Arxida	140x70x75	2.100.000,00	1	-	-	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
42	3.2.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kaubang	1	2017	Arxida	140x70x75	4.250.000,00	1	-	-	-	-	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-
43	3.2.2.05.02.01.001	Meja Kerja Kaubang	1	2017	Arxida	140x70x75	10.120.000,00	4	-	-	-	-	40.480.000,00	40.480.000,00	-	-
44	3.2.2.05.02.01.002	Meja Kerja Sekretaris	2	2017	Arxida	140x70x75	2.300.000,00	1	-	-	-	-	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-
45	3.2.2.05.02.01.001	Meja Kerja Staf	1	2017	Arxida	110x60x75	21.175.000,00	5	-	-	-	-	105.875.000,00	105.875.000,00	-	-
46	3.2.2.05.02.01.001	Meja Pening	1	2017	Arxida	100x60x75	10.000.000,00	1	-	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
47	3.2.2.05.02.06.002	TV LED	1	2017	Samsung	43 inch	8.445.000,00	1	-	-	-	-	8.445.000,00	8.445.000,00	-	-
48	3.2.2.05.02.06.002	TV LED	1	2017	Samsung	43 inch	8.445.000,00	1	-	-	-	-	8.445.000,00	8.445.000,00	-	-
49	3.2.2.05.02.06.003	Kamera	1	2017	Canon	-	22.300.000,00	1	-	-	-	-	22.300.000,00	22.300.000,00	-	-
50	3.2.2.06.02.01.010	Mein Fax	1	2017	Bosch	-	4.000.000,00	1	-	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
51	3.2.2.10.01.02.001	PC All In One	2	2017	Lenovo	-	14.510.000,00	22	-	-	-	-	174.120.000,00	174.120.000,00	-	-
52	3.2.2.10.02.02.017	Printer Dot Matrik	1	2017	Epson	-	2.350.000,00	3	-	-	-	-	7.050.000,00	7.050.000,00	-	-
53	3.2.2.10.02.02.017	Printer Warna	1	2017	Epson	-	9.000.000,00	3	-	-	-	-	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-
54	3.2.2.05.01.04.002	Mein Peng/Loker	1	2018	-	-	19.000.000,00	1	-	-	-	-	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-
55	3.2.2.05.01.04.002	Mein Peng/Loker	1	2018	-	-	19.000.000,00	2	-	-	-	-	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-
56	3.2.2.05.01.04.002	Mein Peng/Loker	1	2018	-	-	19.000.000,00	2	-	-	-	-	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-
57	3.2.2.05.01.04.002	Mein Peng/Loker	1	2018	-	-	11.600.000,00	1	-	-	-	-	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-
58	3.2.2.05.01.04.002	Mein Peng/Loker	1	2018	-	-	11.600.000,00	1	-	-	-	-	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-
59	3.2.2.05.01.04.002	Mein Peng/Loker	1	2018	-	-	11.600.000,00	1	-	-	-	-	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-
60	3.2.2.05.01.04.002	Mein Peng/Loker	1	2018	-	-	11.600.000,00	1	-	-	-	-	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-
61	3.2.2.05.01.04.002	Mein Peng/Loker	1	2018	-	-	11.600.000,00	1	-	-	-	-	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-
62	3.2.2.05.02.01.002	Meja Bantawa	1	2018	-	-	6.000.000,00	1	-	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
63	3.2.2.05.02.01.001	Kursi Kerja Bant.	1	2018	-	-	2.700.000,00	8	-	-	-	-	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-
64	3.2.2.05.02.01.004	Kursi Kerja Bant.	1	2018	-	-	2.700.000,00	4	-	-	-	-	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-
65	3.2.2.05.02.01.004	Kursi Kerja Bant.	1	2018	-	-	2.700.000,00	2	-	-	-	-	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-
66	3.2.2.05.02.01.008	Meja Meeting	1	2018	-	-	14.900.000,00	1	-	-	-	-	14.900.000,00	14.900.000,00	-	-
67	3.2.2.05.02.01.014	Meja Receptionis	1	2018	-	-	4.970.000,00	1	-	-	-	-	4.970.000,00	4.970.000,00	-	-
68	3.2.2.05.02.01.017	Meja Kepala Biro	1	2018	-	-	18.000.000,00	1	-	-	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	TAHUN PEROLEHAN	MERK/MODEL	URUSAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BARANG	HOMOR BANGKA	HOMOR MESHI	NOMOR POKSI	NOMOR BPKB	RIILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	RIILAI BUKU	BEBAN
69	13.2.05.02.01.030	Kursi Rajat	1	2018	-	-	3.200.000,00	10	-	-	-	-	32.000.000,00	25.600.000,00	6.400.000,00	-
70	13.2.05.02.01.048	Sofa Tenu	1	2018	Kenway sofa dan myra 1	-	14.700.000,00	1	-	-	-	-	14.700.000,00	11.760.000,00	2.940.000,00	-
71	13.2.05.02.04.001	Kulkas	1	2018	Prasonic	-	4.365.000,00	1	-	-	-	-	4.365.000,00	3.492.000,00	873.000,00	-
72	13.2.05.02.06.038	Dispenser	1	2018	Sharp	-	2.915.000,00	1	-	-	-	-	2.915.000,00	2.332.000,00	583.000,00	-
73	13.2.05.02.06.077	Micro wave	1	2018	Prasonic	-	1.595.000,00	1	-	-	-	-	1.595.000,00	1.276.000,00	319.000,00	-
74	13.2.05.03.01.005	MESIN KADABG	1	2018	Montana	560455675	8.940.000,00	1	-	-	-	-	8.940.000,00	7.146.000,00	1.794.000,00	-
75	13.2.05.03.01.005	MESIN KADABG	1	2018	Montana	560455675	9.950.000,00	1	-	-	-	-	9.950.000,00	7.960.000,00	1.990.000,00	-
76	13.2.05.03.01.005	MESIN KADABG	1	2018	Montana	5604556	9.950.000,00	1	-	-	-	-	9.950.000,00	7.960.000,00	1.990.000,00	-
77	13.2.05.03.01.004	Kursi Kepala Biro	1	2018	Uffern Director Chair	-	7.950.000,00	1	-	-	-	-	7.950.000,00	6.360.000,00	1.590.000,00	-
78	13.2.05.03.03.005	Kursi Kepala	1	2018	Foster Managerial chair	-	4.950.000,00	1	-	-	-	-	4.950.000,00	3.960.000,00	990.000,00	-
79	13.2.05.03.03.005	Kursi Kepala	1	2018	Foster Managerial Chair	-	4.950.000,00	1	-	-	-	-	4.950.000,00	3.960.000,00	990.000,00	-
80	13.2.05.03.03.005	Kursi Kepala	1	2018	Foster Managerial	-	4.950.000,00	1	-	-	-	-	4.950.000,00	3.960.000,00	990.000,00	-
81	13.2.05.03.03.005	Kursi Kepala	1	2018	Livespool Managerial	-	2.400.000,00	9	-	-	-	-	21.310.000,00	17.856.000,00	4.454.000,00	-
82	13.2.05.03.05.003	Kursi Hadap Kabag	1	2018	-	-	2.200.000,00	2	-	-	-	-	4.400.000,00	3.520.000,00	880.000,00	-
83	13.2.05.03.05.003	Kursi Hadap Kabag	1	2018	-	-	2.200.000,00	2	-	-	-	-	4.400.000,00	3.520.000,00	880.000,00	-
84	13.2.05.03.05.003	Kursi Hadap Kabag	1	2018	-	-	2.200.000,00	2	-	-	-	-	4.400.000,00	3.520.000,00	880.000,00	-
85	13.2.05.03.05.003	Kursi Hadap Kepala Biro	1	2018	Rues 163 Victor Chair	-	1.450.000,00	2	-	-	-	-	2.900.000,00	2.320.000,00	580.000,00	-
86	13.2.05.03.05.003	Kursi Hadap Kepala Biro	1	2018	-	-	2.200.000,00	10	-	-	-	-	22.000.000,00	17.600.000,00	4.400.000,00	-
87	13.2.05.03.05.003	Projector Inforant	1	2018	BENC W1790	-	15.200.000,00	1	-	-	-	-	15.200.000,00	12.160.000,00	3.040.000,00	-
88	13.2.10.01.02.001	PC All In One	1	2018	LENOVO	-	14.850.000,00	3	-	-	-	-	44.550.000,00	44.550.000,00	-	-
89	13.2.10.01.02.001	PC All In One	1	2018	Lenovo	-	15.300.000,00	9	-	-	-	-	137.700.000,00	137.700.000,00	-	-
90	13.2.10.01.02.002	Laptop	1	2018	Lenovo	-	11.900.000,00	4	-	-	-	-	51.600.000,00	51.600.000,00	-	-
91	13.2.10.01.02.002	Laptop	1	2018	LENOVO	Mix 410	14.900.000,00	1	-	-	-	-	14.900.000,00	14.900.000,00	-	-
92	13.2.10.02.03.004	Scanner (Perikatan Personal Komputer)	1	2018	Fujitsu	-	4.700.000,00	2	-	-	-	-	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-
93	13.2.10.02.04.001	Server	1	2018	Lenovo	-	92.000.000,00	1	-	-	-	-	92.000.000,00	92.000.000,00	-	-
94	13.2.10.02.05.008	Thermogan 1	1	2020	LC-166	-	2.000.000,00	1	-	-	-	-	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00	-
95	13.2.10.02.05.008	Thermogan 2	1	2020	Aisure	-	1.200.000,00	1	-	-	-	-	1.200.000,00	480.000,00	720.000,00	-
96	13.2.05.01.06.008	Wastafel	1	2020	Total	-	2.000.000,00	1	-	-	-	-	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00	-
97	13.2.10.01.02.001	P C Unit	1	2021	-	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	17.317.884,00	4.328.471,00	12.989.413,00	-
98	13.2.10.01.02.001	P C Unit	1	2021	-	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	17.317.884,00	4.328.471,00	12.989.413,00	-
99	13.2.10.01.02.001	P C Unit	1	2021	-	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	17.317.884,00	4.328.471,00	12.989.413,00	-
100	13.2.10.01.02.001	P C Unit	1	2021	-	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	17.317.884,00	4.328.471,00	12.989.413,00	-
101	13.2.10.01.02.001	P C Unit	1	2021	-	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	17.317.884,00	4.328.471,00	12.989.413,00	-
102	13.2.10.01.02.001	P C Unit	1	2021	-	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	17.317.884,00	4.328.471,00	12.989.413,00	-
103	13.2.10.01.02.001	P C Unit	1	2021	-	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	17.317.884,00	4.328.471,00	12.989.413,00	-
104	13.2.10.01.02.001	P C Unit	1	2021	-	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	17.317.884,00	4.328.471,00	12.989.413,00	-
105	13.2.10.01.02.001	P C Unit	1	2021	-	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	17.317.884,00	4.328.471,00	12.989.413,00	-
106	13.2.10.01.02.001	P C Unit	1	2021	-	0	24.227.402,00	1	0	0	0	0	24.227.402,00	6.054.850,5	18.172.551,50	-
107	13.2.10.01.02.001	Note Book	1	2021	-	0	14.084.448,00	1	0	0	0	0	14.084.448,00	9.511.167,00	4.573.281,00	-
108	13.2.10.01.02.001	Note Book	1	2021	-	0	14.084.448,00	1	0	0	0	0	14.084.448,00	9.511.167,00	4.573.281,00	-
109	13.2.10.02.03.003	Printer (Perikatan Personal Komputer)	1	2021	-	0	5.146.432,00	1	0	0	0	0	5.146.432,00	1.286.605,15	3.859.826,85	-

101	1.2.10.01.02.001	P.C Unit	1	2021	0	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	0	0	17.317.884,00	4.325.471,00	12.988.413,00	-
102	1.2.10.01.02.001	P.C Unit	1	2021	0	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	0	0	17.317.884,00	4.325.471,00	12.988.413,00	-
103	1.2.10.01.02.001	P.C Unit	1	2021	0	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	0	0	17.317.884,00	4.325.471,00	12.988.413,00	-
104	1.2.10.01.02.001	P.C Unit	1	2021	0	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	0	0	17.317.884,00	4.325.471,00	12.988.413,00	-
105	1.2.10.01.02.001	P.C Unit	1	2021	0	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	0	0	17.317.884,00	4.325.471,00	12.988.413,00	-
106	1.2.10.01.02.001	P.C Unit	1	2021	0	0	24.227.402,00	1	0	0	0	0	0	0	24.227.402,00	6.056.850,5	18.170.551,50	-
107	1.2.10.01.02.003	Note Book	1	2021	0	0	14.084.648,00	1	0	0	0	0	0	0	14.084.648,00	3.521.162,00	10.563.486,00	-
108	1.2.10.01.02.003	Note Book	1	2021	0	0	14.084.648,00	1	0	0	0	0	0	0	14.084.648,00	3.521.162,00	10.563.486,00	-
109	1.2.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2021	0	0	5.146.421,00	1	0	0	0	0	0	0	5.146.421,00	1.286.605,25	3.859.815,75	-

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	TAHUN PELOLEHAN	MERK/MODEL	UJARAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BARANG	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR POLISI	NOMOR BPKS	NILAI TEROLEHAN	AKUMULASI PENYISUTAN	NILAI BUKU	BEBAN
110	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Penilaian Personal Komputer)	1	2021		0	5.146.421,00	1	0	0	0	0	5.146.421,00	1286.605,25	3.859.815,75	-
111	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Penilaian Personal Komputer)	1	2021		0	5.146.421,00	1	0	0	0	0	5.146.421,00	1286.605,25	3.859.815,75	-
112	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Penilaian Personal Komputer)	1	2021		0	5.146.421,00	1	0	0	0	0	5.146.421,00	1286.605,25	3.859.815,75	-
113	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Penilaian Personal Komputer)	1	2021		0	5.146.421,00	1	0	0	0	0	5.146.421,00	1286.605,25	3.859.815,75	-
114	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Penilaian Personal Komputer)	1	2021		0	5.146.421,00	1	0	0	0	0	5.146.421,00	1286.605,25	3.859.815,75	-
115	1.3.2.10.02.03.004	Scanner (Penilaian Personal Komputer)	1	2021		0	4.993.810,00	1	0	0	0	0	4.993.810,00	1248.602,5	3.745.357,50	-
116	1.3.2.10.02.03.004	Scanner (Penilaian Personal Komputer)	1	2021		0	4.993.810,00	1	0	0	0	0	4.993.810,00	1248.602,5	3.745.357,50	-

NILAI PEROLEHAN	2.377.520.706,00
AKUMULASI PENYISUTAN	1.904.021.199,00
NILAI/SALDO BUKU	473.499.507,00
BEBAN PENYISUTAN TAHUN 2	-

## 1.2 PERMASALAHAN UTAMA

Pada saat ini Biro Administrasi Pembangunan terdapat 3 (tiga) Sasaran Startegis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2022 yang hanya 2 (dua) Sasaran Startegis dan 2 (dua) Indikator Kinerja. Adapun yang menjadi permasalahan utama dan menjadi sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 yaitu ***Persentasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan***. Biro Administrasi Pembangunan bertujuan bagaimana seluruh Perangkat Daerah ( OPD Provinsi Sumatera Barat ) dan Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan tertib administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang anggarannya dari dana APBD dan APBN.

## **BAB II** **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja ) Tahun 2022 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 sebagai titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2022 Biro Administrasi Pembangunan sesuai kebijakan Gubernur Sumatera Barat untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat, Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mempergunakan e-SAKIP. Untuk Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempergunakan e-SAKIP berdasarkan Renstra 2021-2026 serta DPA Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2022.

### **2.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

#### *2.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Rencana Strategis 2021-2026*

Visi Gubernur Sumatera Barat 2021-2026 merupakan gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan, maka visi Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah. Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih merupakan janji politik yang disampaikan saat kampanye. Visi dan Misi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka Visi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera barat tahun 2021-2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Gubernur Sumatera Barat yang pada dasarnya merupakan upaya umum dan akan diselenggarakan serta menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2021-2026.

Misi merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah dan berdasarkan pengertian Misi tersebut maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya asing.**
2. **Meningkatkan tata kehidupan social kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.**
3. **Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.**
4. **Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital**
5. **Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.**
6. **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.**
7. **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.**

Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan kepada **Misi 7** yaitu **"Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas"** dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tujuan " Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparaturnya yang melayani "**

**Sasaran " Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel "**

Dari Visi, Misi dan Tujuan yang tersebut di atas **Strategi** yang akan dicapai Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan RPJMD 2021-2026 yaitu **" Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah "** dengan **Arah Kebijakan** adalah **" Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah"**

Sedangkan **Indikator Kinerja Kunci** Biro Administrasi Pembangunan yang termuat dalam RPJMD 2021-2026 yang menjadi sasaran Biro Administrasi Pembangunan adalah **" Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (%) "**, yang menjadi **Sasaran Strategis 1 ( satu )** Biro.

**Sasaran Strategis 2 ( dua )** berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 yaitu **" Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi"**

**Sasaran Strategis 2 ( tiga )** berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 yaitu **" Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi"**

# RPJMD 2021-2026

MISI (7)

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	TERWUJUDKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DENGAN APARATUR YANG MELAYANI	MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	MENINGKATKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENINGKATAN KUALITAS PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH  
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	IKK	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	PERSENTASI PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA YANG TERTIB DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	90	90	91	92	93	94
							95

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

**Tabel 2.1**  
**Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Biro Administrasi Pembangunan**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mewujudkan Pengendalian Pembangunan yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	91
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B ( 61 )
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (80)

**Tabel 2.2**  
**Program dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022**  
**Biro Administrasi Pembangunan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
<b>I</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.134.861.003</b>
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.988.000
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.285.000
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.800.000
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.339.600
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	736.531.203
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.600.000
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.887.850
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.429.350
<b>II</b>	<b>KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>2.203.583.000</b>
II.1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.355.758.500
II.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	847.824.500
<b>J U M L A H</b>		<b>3.338.444.003</b>

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Proses penyusunan pelaporan kinerja dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi instansi dengan tujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, dimana pelaporan kinerja ini akan menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai suatu pijakan dapat diwujudkan.

Tujuan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik adalah untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Pengukuran capaian target indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan terhadap Perubahan Tahun 2022. Hasil pengukuran capaian target kinerja disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro dalam memfasilitasi, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan

lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka indikator ini didasarkan atas dampak jangka pendek yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) tidak dapat digunakan, karena indikator ini akan lebih efektif digunakan sebagai pengukuran kinerja jangka panjang, dimana dalam pengukuran indikator kinerja ini perlu penelitian, analisa dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta aplikasinya di lapangan.

### 3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Dalam pengukuran akuntabilitas kinerja diperlukan data pendukung pelaksanaan kegiatan yang berasal dari sumber internal dan eksternal, dengan pengertian sebagai berikut :

- a. **Data Internal**, yaitu yang berasal dari sistem informasi yang ada pada Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Administrasi Pembangunan, dimana tingkat pengolahan data dilakukan pada level Bagian dan Sub Bagian serta staf yang berada pada Biro.
- b. **Data Eksternal**, yaitu data yang berasal dari stakeholder atau pihak-pihak di luar Biro Administrasi Pembangunan

**Biro Administrasi Pembangunan** mendapatkan data melalui :

- 1) Rapat-rapat koordinasi antara Asisten dengan OPD Provinsi, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,
- 2) Rapat kerja/rapat koordinasi/bimbingan teknis/rapat dan pertemuan reguler Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Biro/ Bagian yang berwenang dalam urusan pembangunan.
- 3) Rapat kerja dalam rangka melakukan pelaporan realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi Simbangda berbasis Evidence.

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan.

Untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarnya diklasifikasikan berdasarkan tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

<b>Hasil Capaian (%)</b>	<b>Kategori Penilaian</b>
85 - < 100	Sangat berhasil
75 - < 84	Berhasil
56- < 74	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja sebagaimana tabel tersebut di atas, mengacu kepada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan > **75 %**.

## **3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA**

### **3.2.1 CAPAIAN KINERJA BAGIAN**

Hasil pengukuran kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2022 dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bagian pada Biro Administrasi Pembangunan.

#### **I. BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah berpedoman kepada Perjanjian Kinerja Kepala Bagian dengan Kepala Biro dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel. 3.2.1**  
**Perjanjian Kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan**  
**Pembangunan Daerah**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang pelaksanaan kegiatan tepat waktu	91%
2.	Optimalnya tertib administrasi pembangunan	Tingkat kesesuaian administrasi pelaksanaan kegiatan dengan standar pada Perangkat Daerah	91%
3.	Optimalisasi pengendalian pembangunan	Persentase rekomendasi yang diberikan terhadap permasalahan administrasi pembangunan Provinsi	91%
4.	Meningkatnya pengawasan organisasi	Berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	10%

Berdasarkan Perjanjian kinerja pada tabel 3.2.1 tersebut untuk pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai Indikator Kinerja Program yaitu ***“Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD dengan target 91%”***

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2022 melaksanakan 2 Sub Kegiatan yaitu

**a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, yang melaksanakan kegiatan :**

- Pelaksanaan monev paket kegiatan di SKPD se-Sumatera Barat
- Pelaksanaan rapat-rapat penyelesaian masalah
- Pelaksanaan rakor dengan OPD
- Pembuatan laporan triwulan, dan laporan akhir kegiatan

- Kegiatan insidentil seperti pendampingan tamu resmi dll

Untuk realisasi Fisik sampai tanggal 31 Desember 2022 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera sebesar :

$$\frac{96,49}{99,52} \times 100\% = 96,95\%$$

Dari hasil realisasi fisik 96,95% berarti melebihi dari target pada Indikator Kinerja Program Kegiatan *Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD sebesar 91%*

Untuk realisasi Keuangan sampai tanggal 31 Desember 2022 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera sebesar :

$$\frac{93,92}{99,92} \times 100\% = 93,99\%$$

Dari hasil realisasi fisik 93,99% berarti melebihi dari target pada Indikator Kinerja Program Kegiatan *Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD sebesar 91%*

Angka realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Hasil Rekapitulasi Aplikasi Simbangda) tabel 3.2.2 sebagai berikut :



**b. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN, melaksanakan kegiatan sebagai berikut :**

- Pelaksanaan monev paket kegiatan di SKPD yang memiliki sumber dana perimbangan seperti DAK Fisik, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan koordinasi dengan satuan kerja Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan di Sumatera Barat.
- Pelaksanaan rapat-rapat penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dana bersumber dari APBN
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan OPD, Satker Kementerian, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- Pembuatan laporan triwulan, dan laporan akhir kegiatan
- Kegiatan insidentil seperti pendampingan tamu resmi dll

Berdasarkan Perjanjian kinerja tersebut untuk pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai Indikator Kinerja Program “ **Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBN dengan target 91%** “. Hasil dari pelaksanaan kegiatan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 3.2.3**

**DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022**

NO	BIDANG	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	Irigasi	12.747.874.000	10.173.332.500	79,80%
2	Jalan	53.695.096.000	52.689.920.285	98,13%
3	Kehutanan	9.332.104.000	5.975.375.700	64,03%
4	Kelautan dan Perikanan	12.236.600.000	10.013.507.210	81,83%
5	Kesehatan dan KB	42.946.675.000	28.383.738.232	66,09%
6	Pendidikan	149.019.964.000	147.923.201.849	99,26%
	<b>TOTAL</b>	<b>279.978.313.000</b>	<b>255.159.075.776</b>	<b>91,14%</b>

Sumber :Data Kanwil DJPb Sumatera Barat tanggal 31 Desember 2022

Dari tabel 3.2.3 dapat dilihat bahwa persentase realisasi Keuangan Dana Alokasi Khusus Fisik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 91,14% yang artinya melebihi target Indikator Kinerja Program Kebijakan Administrasi Pembangunan sebesar 91%.

**Tabel. 3.2.4**

**DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN/KOTA SE- SUMATERA BARAT TAHUN 2022**

NO	BIDANG	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	KAB. A G A M	106.357.523.000	92.154.654.218	86,65%
2	KAB. DHARMAS RAYA	68.025.379.000	64.465.577.604	94,77%
3	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	82.004.624.000	66.556.524.219	81,16%
4	KAB. LIMAPULUH KOTA	114.473.134.000	98.518.292.418	86,06%
5	KAB. PADANG PARIAMAN	106.116.082.000	93.252.089.236	87,88%
6	KAB. PASAMAN	98.068.246.000	84.636.954.404	86,30%
7	KAB. PASAMAN BARAT	98.954.464.000	88.441.827.611	89,38%
8	KAB. PESISIR SELATAN	173.793.191.000	160.741.464.312	92,49%
9	KAB. S O L O K	109.864.506.000	97.897.272.916	89,11%
10	KAB. SIJUNJUNG	131.972.946.000	98.020.713.771	74,27%
11	KAB. SOLOK SELATAN	90.874.080.000	82.711.466.024	91,02%
12	KAB. TANAH DATAR	59.161.144.000	54.441.949.954	92,02%
13	KOTA BUKITTINGGI	50.709.363.000	38.100.592.208	75,14%
14	KOTA PADANG	57.701.647.000	50.246.336.758	87,08%
15	KOTA PADANG PANJANG	26.013.378.000	21.616.550.919	83,10%
16	KOTA PARIAMAN	34.300.667.000	31.604.833.631	92,14%
17	KOTA PAYAKUMBUH	44.876.767.000	37.979.453.743	84,63%
18	KOTA S O L O K	31.055.651.000	27.199.217.536	87,58%
19	KOTA SAWAHLUNTO	88.905.642.000	74.358.095.142	83,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.573.228.434.000</b>	<b>1.362.943.866.624</b>	<b>86,63%</b>

Sumber :Data Kanwil DJPb Sumatera Barat tanggal 31 Desember 2022

Data dari tabel 3.2.4 merupakan realisasi keuangan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik se Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 86,63%, Berarti realisasinya tidak memenuhi target yang ada pada Indikator Kinerja Program sebesar 91%. Kondisi ini disebabkan karena sampai tanggal 10 Jaunari 2023 masih banyak Kabupaten/Kota yang belum melakukan pelaporan melalui aplikasi Omspan Kementerian Keaungan RI.

**Tabel. 3.2.5**

**DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN SUMATERA BARAT TAHUN 2022**

N O	SATKER	PAGU	REALISASI	(%)
<b>A.</b>	<b>DEKONSETRASI</b>	<b>57.617.960.000</b>	<b>49.280.574.273</b>	<b>85,53%</b>
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1.980.460.000	1.979.852.000	99,97%
2	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	14.765.446.000	7.536.043.450	51,04%
3	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT	10.419.510.000	9.932.573.147	95,33%
4	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	1.196.688.000	1.189.976.418	99,44%
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM &PTSP) PROV. SUMATERA BARAT	592.146.000	590.968.901	99,80%
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	521.861.000	511.880.362	98,09%
7	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI SUMATERA BARAT	2.859.250.000	2.796.647.240	97,81%
8	DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT	1.490.000.000	1.433.570.366	96,21%
9	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	15.966.342.000	15.819.090.725	99,08%
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	4.393.843.000	4.260.014.584	96,95%
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUMATERA BARAT	2.095.381.000	2.053.604.151	98,01%
12	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	999.955.000	853.827.084	85,39%
13	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	337.078.000	322.525.845	95,68%
<b>B</b>	<b>TUGAS PEMBANTUAN</b>	<b>103.408.899.000</b>	<b>89.466.324.665</b>	<b>86,52%</b>
1	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	41.347.138.000	40.913.208.607	98,95%
2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT	29.336.464.000	17.179.725.020	58,56%
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	912.014.000	391.667.536	42,95%
4	DINAS BINA MARGA CIPTA KAYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	10.342.204.000	10.207.312.163	98,70%

5	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT	20.727.549.000	20.040.759.888	96,69%
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	743.530.000	733.651.451	98,67%
<b>C</b>	<b>TUGAS PEMBANTUAN KAB/KOTA</b>	<b>7.147.011.000</b>	<b>7.058.636.127</b>	<b>98,76%</b>
1	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN AGAM	2.707.357.000	2.697.808.565	99,65%
2	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIJUNJUNG	892.801.000	874.129.000	97,91%
3	DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG	3.546.853.000	3.486.698.562	98,30%
	<b>TOTAL</b>	<b>168.173.870.000</b>	<b>145.805.535.065</b>	<b>86,70%</b>

Data pada tabel 3.2.5 yang menyampaikan data realisasi keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 86,70% yang artinya rendah dari target pada Indikator Kinerja Program sebesar 91% hal ini disebabkan ada beberapa kebijakan dari pusat yang merelokasi anggaran dan penggantian pejabat kementerian/lembaga sehingga mempengaruhi pada saat penyaluran anggaran mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2022 khususnya di bidang kesehatan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Biro Administrasi Pembangunan telah memfasilitasi beberapa kali rapat permasalahan dan percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga melalui Satuan Kerja yang berada di Sumatera Barat, baik pelaksanaan pekerjaan infrastruktur hingga kegiatan ketertiban masyarakat.

Dari ke 2 ( dua ) Sub Kegiatan tersebut di Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah lebih banyak melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah dan melakukan rapat-rapat sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat Persentase OPD dalam melaksanakan kegiatan serta

ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja.

Adapun rincian realisasi Anggaran Kegiatan 2022 untuk Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

**Tabel. 3.2.6**

**Anggaran Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

II	KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp. 2.203.583.000,-	Rp. 2.178.550.060,-	98,83
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.355.758.500,-	Rp. 1.342.211.286,-	98,94
1.a	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp. 329.785.000,-	Rp. 322.658.655,-	97,84
2.b	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp. 319.295.500,-	Rp. 318.537.363,-	99,51

Berdasarkan tabel 3.2.6 bahwa realisasi keuangan pada sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD sebesar 97,84 dan sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN sebesar 99,51%. Dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan melebihi target dari yang ditetapkan 91% pada indikator kinerja program.

## **II. BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH**

Dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah berpedoman kepada Perjanjian Kinerja Kepala Bagian dengan Kepala Biro dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel. 3.2.7**

**Perjanjian Kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan  
Pembangunan Wilayah**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan	Persentase Kabupaten/Kota yang pelaksanaan kegiatan tepat waktu	91%
2.	Optimalnya tertib administrasi pembangunan	Tingkat kesesuaian administrasi pelaksanaan kegiatan dengan standar pada Kabupaten/Kota	91%
3.	Optimalisasi pengendalian pembangunan	Persentase rekomendasi yang diberikan terhadap permasalahan administrasi pembangunan Kabupaten/Kota	91%
4.	Meningkatnya pengawasan organisasi	Berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	10%

Pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah juga memiliki Indikator Kinerja Program yang sama yaitu :

**“ Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dengan target 91% “**

Adapun realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 3.2.8 berikut :

Tabel 3.2.8

**REKAPITULASI**  
**LAPORAN REALISASI APBD KAB/KOTA SE SUMBAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**KEADAAN S.D 31 DESEMBER 2022**

NO	KABUPATEN / KOTA	TOTAL PAGU (Rp)	FISIK	REALISASI		KET
				KEUANGAN Rp.	%	
	<b>KOTA</b>					
1	PADANG	2.432.047.873,684	98.55	2.224.649.868,849	91.47	
2	BUKITTINGGI	837.145.281.505	96.26	744.071.869,350	88.88	
3	SOLOK	654.597.785.995	98.11	577.522.797,898	88.23	
4	PADANG PANJANG	816.638.674,470	98.10	545.209.090,061	88.42	
5	PAYAKUMBUH	752.356.007,312	98.76	695.915.984,175	92.50	
6	PARIAMAN	641.914.893,376	96.95	606.442.560,334	94.47	
7	SAWAHLUNTO	682.809.902,738	94.47	643.318.214,625	94.22	
	<b>KABUPATEN</b>					
8	PADANG PARIAMAN	1.407.999.184,315	95.10	1.313.870.894,825	93.31	
9	PASAMAN	1.154.361.957,407	96.59	1.004.981.080,172	87.06	
10	PASAMAN BARAT	1.300.488.596,612	91.36	1.136.117.674,097	87.36	
11	SIUJUNJUNG	1.167.312.419,936	86.04	947.123.623,605	81.14	
12	DHARMASRAYA	988.684.828,840	95.66	939.153.549,946	94.99	
13	SOLOK	1.322.562.690,203	98.06	1.233.491.569,482	93.27	
14	SOLOK SELATAN	962.869.500,804	93.60	897.247.350,747	93.18	
15	50 KOTA	1.335.440.101,346	98.25	1.230.594.730,098	92.15	
16	TANAH DATAR	1.288.136.563,234	98.88	1.186.934.494,819	92.14	
17	AGAM	1.543.243.533,214	73.37	1.437.286.315,520	93.13	
18	KEP. MENTAWAI	902.742.047,968	86.13	738.296.259,857	81.78	
19	PESISIR SELATAN	1.763.605.092,125	96.55	1.629.156.880,488	92.38	
	<b>JUMLAH</b>	<b>21,754,956,535,084</b>	<b>94.25</b>	<b>19,731,384,788,947</b>	<b>90.70</b>	

Tabel 3.2.8 menampilkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten/Kota kondisi sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi fisik 94,25% berarti melebihi dari target Indikator Kinerja Program yaitu 91%. Realisasi keuangan sebesar 90,70% berarti berada sedikit di bawah target sebesar 91%. Hal ini disebabkan keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang dananya dari DAK.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah untuk tahun 2022 melaksanakan 1 (satu) buah Sub Kegiatan yaitu :

1. Pengendalian Adminitrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dengan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan :
  - Pelaksanaan Koordinasi;
  - Pelaksanaan Koordinasi Realisasi APBD dan APBN Kab/Kota ;
  - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
  - Rapat Evaluasi.
  - Rapat Pengendalian dan Monev BKK.
2. Menyikapi pentingnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan ( LRFK ) kabupaten/kota, maka melalui Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, dipersiapkanlah beberapa langkah kerja dan target kinerja yang terukur, yakni :
  - a. Mengadakan pertemuan awal dengan Kabupaten Kota
  - b. Meminta dan merekap LRFK pada 19 (Sembilan Belas) Kabupaten Kota
  - c. Menyampaikan data LRFK tiap bulan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota
  - d. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Bappeda, BPKAD dan Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Kota secara rutin.
  - e. Mengadakan Rapat Evaluasi Kabupaten Kota.

Berdasarkan uraian diatas tahun 2022 anggaran APBD yang pada kegiatan PAPPW sebesar **Rp. 706.678.000,-** dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 **Rp. 701.015.268,-** dan sisa **Rp.**

**5.662.732,-** oleh sebab itu capaian kinerja dari target 91% sudah bisa dikatakan tercapai dengan hasil realisasi persentase sebesar **99,20 %**.

Dari Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah lebih banyak melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota dan melakukan rapat-rapat sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dengan tujuan dapat mengetahui tingkat Persentase dalam melaksanakan kegiatan serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja.

Adapun realisasi anggaran Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah sebagai berikut :

**Tabel. 3.2.9**

**Anggaran Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	<b>KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>			
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp. 705.678.000,-	Rp. 701.015.268,-	99,20

Dari tabel 3.2.9 dapat disimpulkan realisasi keuangan sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mencapai 99,20% dengan arti melebihi target 91% berdasarkan indikator kinerja program.

### **III. BAGIAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai Perjanjian Kinerja dengan Kepala Biro sebagai berikut :

**Tabel. 3.2.10**

**Perjanjian Kinerja Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan tepat waktu	91%
2.	Optimalnya tertib Administrasi Pembangunan	Tingkat kesesuaian administrasi pelaksanaan kegiatan dengan standar pada Perangkat Daerah	91%
3.	Optimalisasi pengendalian pembangunan	Persentase rekomendasi yang diberikan s1 terhadap permasalahan administrasi pembangunan	91%
4.	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	10%

Dari Perjanjian Kinerja untuk Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai Indikator Kinerja Program “ **Kebijakan Administrasi Pembangunan Yang Dihasilkan dengan target 2 kebijakan** “

Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2022 Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
  - a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan analisis capaian kinerja pembangunan daerah. Pelaksanaan koordinasi kegiatan semula direncanakan melalui pertemuan atau kunjungan ke UPTB yang ada di Kab/Kota dan ke Pemerintah Pusat untuk koordinasi dan konsultasi Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri.
  - b. Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah di Bidang Analisis Capaian Pembangunan

Daerah. Kegiatan ini dilakukan melalui aplikasi Simbangda based evidence yang dilakukan secara rutin oleh helpdesk dan admin Simbangda dan hasilnya berupa rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan SKPD setiap akhir bulan.

- c. Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah. Pada tahun 2022 dilakukan rapat koordinasi bersama SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan sistim rapat sesuai lingkup per asisten.

## 2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- a. Melaksanakan rapat persiapan dengan materi pengarahan, penyamaan persepsi dan pembagian tugas terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyusun dan menerbitkan SK Tim Pelaksana Pelaporan Pembangunan tahun 2022;
- c. Melakukan inventarisasi terhadap kegiatan / pekerjaan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD lingkup Provinsi Sumatera Barat dan mengelompokkannya atas beberapa kriteria.
- d. Menyampaikan tatanan pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan instrumen monev, peraturan gubernur, serta surat edaran gubernur.
- e. Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis serta rapat tindak lanjut permasalahan bersama SKPD terkait serta unsur terkait lainnya.
- f. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan / kemajuan pekerjaan SKPD setiap bulannya dan atau triwulan.
- g. Melaksanakan rapat evaluasi secara berkala (triwulan) bersama SKPD, Asisten, Sekda dan Gubernur/Wakil Gubernur
- h. Melaksanakan rapat dalam rangka penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan SKPD bersama Tim yang telah ditetapkan.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala.

3. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
  - a. Menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Provinsi Sumatera Barat;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang HSPK dan ASB
  - c. Memfasilitasi pemanfaatan HSPK dan ASB oleh Perangkat Daerah
  - d. Menyiapkan rencana pengembangan SDM
  - e. Menyiapkan rencana monitoring dan evaluasi
  - f. Menyusun Laporan

Pelaksanaan pekerjaan HSPK dan ASB tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro yang merupakan tugas tambahan diberikan oleh pimpinan kepada Biro Administrasi Pembangunan.

Dari ke 3 (tiga) Sub Kegiatan pada Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan melaksanakan Perjanjian Kinerja yang bertujuan terlaksananya ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam menggunakan anggaran baik yang bersumber dari APBD dan APBN.

Realisasi anggaran kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel. 3.2.11**  
**Anggaran Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**

2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 847.824.500,-	Rp. 836.338.774,-	98,65
2.a	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp. 105.820.500,-	Rp. 104.565.827,-	98,81
2.b	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 482.835.000,-	Rp. 479.966.155,-	99,41
2.c	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp. 259.169.000,-	Rp. 251.806.792,-	97,16

Dari tabel 3.2.11 merupakan capaian realisasi keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yaitu **98,65%** yang mana target realisasi keuangan sebesar 91%. Sedangkan untuk kebijakan yang dihasilkan hanya 1 buah yang

terrealisasi sehingga tidak memenuhi target pada indikator kinerja program sebesar 2 buah kebijakan.

Terhadap pelaksanaan 2 (dua) kegiatan 6 (enam) sub kegiatan oleh 3 (tiga) Bagian pada Biro Administrasi Pembangunan dapat dilakukan pengukuran sebagai hasil kinerja sebagai berikut ini pada tabel 3.2.12:

**Tabel 3.2.12**  
**Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja**  
**Tahun 2022**

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan	Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	91 91	PD : 98,26 Kab/Kota : 100	107,98 109,89
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (61)	60.08	98,49
3.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (80)	Baik (88,23)	110,28
<b>Jumlah Capaian .....</b>						426,64
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja .....</b>						106,66

Pada tabel 3.2.12 diatas dapat dilihat bawah target indikator kinerja terhadap 3 ( tiga ) sasaran strategis biro telah diperoleh realisasi dengan jumlah capaian indikator kinerja sebesar 426,64% dengan rata-rata capaian indikator kinerja 106,66%. Selanjutnya rincian capaian kinerja terdiri dari Persentase Perangkat Daerah ( OPD Provinsi ) yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dengan capaian kinerjanya sebesar 107,98%. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dengan capaian kinerjanya sebesar 109.89%. Nilai akuntabilitas kinerja sebesar 99,67% dan Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 106,25%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bawah capaian kinerja untuk sasaran I di ukur dengan formula sebagai berikut ini :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi seluruh sasaran pendukung}}{\text{Jumlah target}} \times 100 \%$$

### 3.3 CAPAIAN KINERJA

#### Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

##### *Mewujudkan Pengendalian Pembangunan yang Optimal*

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 bahwa hasil pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Bagian dirangkum menjadi satu pekerjaan yang terpadu pada Aplikasi Simbangda sebagai bahan pengukur dan data akurat dalam rangka mencapai indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.1 yang selanjutnya dapat dijelaskan sasaran strategis yang menyajikan analisis capaian indikator kinerja.

Sasaran Strategis Biro Administrasi Pembangunan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi biro yang selanjutnya disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan dengan memiliki 1 ( satu ) Sasaran Strategis yaitu “ *Mewujudkan Pengendalian Pembangunan yang Optimal* dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

## Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	91 91	PD : 98.26 Kab/Kota : 100	107,98 109,89
Rata-Rata capaian indikator kinerja				108,94

Cat : PD = Perangkat Daerah

Adapun penghitungan capaian realisasi kinerja terhadap indikator kinerja “ **Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan** ” adalah sebagai berikut :

$$\text{REALISASI TERTIB ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH} = \frac{\text{JUMLAH EVIDENCE DISETUJUI}}{\text{JUMLAH EVIDENCE YANG DI UPLOAD}} \times 100\%$$

$$98.26 \% = \frac{32.824}{33.404} \times 100\%$$

$$\text{REALISASI TERTIB ADMINISTASI KAB/KOTA} = \frac{\text{JUMAH KAB/KOTA PENYAMPAIAN LAPORAN FISIK DAN KEU}}{\text{JUMLAH SELURUH KAB/KOTA}} \times 100\%$$

$$100 \% = \frac{19 \text{ kab/kota}}{19 \text{ kab/kota}} \times 100\%$$

a. Indikator kinerja Perentase Perangkat Daerah Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah ( OPD Provinsi Sumatera Barat ) sebagai berikut :

- i. Upload Data Perencanaan yang terdiri dari : KAK, RUP, HPS, Rapat-rapat persiapan awal kegiatan.
- ii. Upload Data Pelaksanaan yang terdiri dari : Kontrak, SK Tim, Dokumen lelang, dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, rapat-rapat pelaksanaan kegiatan

- iii. Upload Data Pelaporan yang terdiri dari : laporan serah terima kegiatan, Laporan Akhir masing-masing sub kegiatan
- iv. Ketepatan waktu masing-masing OPD melaksanakan upload evidence pada aplikasi Simbangda ( paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya ).

Berdasarkan Indikator Kinerja tersebut diatas bahwa capaian kinerja terhadap rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 108,94% yang rinciannya terdiri dari Persentase Perangkat Daerah ( OPD Provinsi ) yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan capaian kinerjanya sebesar 107,98%. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan capaian kinerjanya sebesar 109,89%.

Dari ke 3 (tiga) data yang di upload tersebut akan menjadi evidence dari masing-masing sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD Provinsi. Data evidence yang telah dilaksanakan sampai kondisi 10 Januari 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.2

**Statistika evidence**  
**Januari sampai Desember**  
**Tahun 2022**

No	SKPD	Helpdesk	Total paket	Total evidence di upload	Total evidence belum di periksa		Total evidence di setuju	Total evidence di tolak
					Swakelola	Penyedia		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Yoval Eka Putra, SH	84	509	0	0	509	0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Elfendrizal	67	358	0	0	358	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rahmi Dewi, ST, MM	103	296	8	26	262	0
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Yoval Eka Putra, SH	71	181	0	0	181	0
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Lisma Oktavia, SE, M.Si	39	137	0	0	137	0
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Yoval Eka Putra, SH	104	269	0	0	264	5
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	Yoval Eka Putra, SH	3	28	0	0	28	0
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Yoval Eka Putra, SH	52	193	0	0	193	0
9	BADAN PENGHUBUNG	Yoval Eka Putra, SH	49	93	0	0	93	0
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Niswen, A.Md	144	1048	0	0	1048	0
11	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	NOVITA RIDHA, S.STP	42	209	0	0	209	0
12	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	DELVI SUKRI	56	67	0	0	67	0
13	BIRO HUKUM	M IKHSAN NOVANDI, S.STP, M.Si	35	115	0	0	115	0
14	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Elfendrizal	36	111	0	0	110	1
15	BIRO ORGANISASI	Niswen, A.Md	23	49	0	0	49	0
16	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rahmi Dewi, ST, MM	61	249	0	0	248	1
17	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	Akmal Rusli, SE	50	182	0	0	166	16
18	BIRO PEREKONOMIAN	NOVITA RIDHA, S.STP	49	285	0	0	285	0
19	BIRO UMUM	Yoval Eka Putra, SH	223	246	0	0	245	1
20	DINAS BINA MARGA, Cipta Karya dan Tata Ruang	FEBI FORTUNA, S.STP	340	2335	0	0	2334	1
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	FEBI FORTUNA, S.STP	65	311	0	0	311	0
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Laura Nurwinda	74	411	0	0	411	0
23	DINAS KEBUDAYAAN	Ekho Wisa	79	344	0	0	344	0
24	DINAS KEHUTANAN	Rinaldi Saputra	470	2837	209	152	2475	1
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ratna Dewi, S.Sos	255	1123	3	14	1105	1
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	Yoval Eka Putra, SH	83	359	0	0	359	0
27	DINAS KESEHATAN	Rahmi Dewi, ST, MM	181	907	8	19	867	13
28	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	DELVI SUKRI	151	1040	7	7	1020	6
29	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	NOVITA RIDHA, S.STP	71	452	0	0	452	0
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ratna Dewi, S.Sos	108	626	0	0	626	0

31	DINAS PANGAN	Akmal Rusli, SE	93	356	0	0	354	2
32	DINAS PARIWISATA	Elfendrizal	80	369	0	0	369	0
33	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rahmi Dewi, ST, MM	49	204	0	0	203	1
34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DELVI SUKRI	68	413	0	0	413	0
35	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	M IKHSAN NOVIANDI, S.STP, M.Si	135	634	0	0	634	0
36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rinaldi Saputra	58	270	0	0	270	0
37	DINAS PENDIDIKAN	MUHAMMAD FAJRI ZALMI, S.STP, M.Si	1762	4745	8	19	4696	22
38	DINAS PERHUBUNGAN	Akmal Rusli, SE	77	422	0	0	422	0
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SYUKRI PITER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kom	167	872	0	0	872	0
40	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Rinaldi Saputra	456	1097	0	0	1095	0
41	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	SYUKRI PITER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kom	1076	3923	0	7	3916	0
42	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	SYUKRI PITER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kom	128	735	0	0	735	0
43	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	M IKHSAN NOVIANDI, S.STP, M.Si	38	113	0	0	113	0
44	DINAS SOSIAL	Ekho Wisa	339	961	0	0	944	17
45	DINAS SUMBAR DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	FEBI FORTUNA, S.STP	268	1467	0	0	1466	1
46	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rinaldi Saputra	67	334	0	0	334	0
47	INSPEKTORAT	Yoval Eka Putra, SH	51	156	0	0	156	0
48	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN	SYAHRIAL MUIS	28	157	0	0	157	0
49	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	SYAHRIAL MUIS	24	173	0	0	173	0
50	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	SYAHRIAL MUIS	14	118	1	0	117	0
51	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	SYAHRIAL MUIS	15	130	0	0	130	0
52	SEKRETARIAT DPRD	Lisma Oktavia, SE, M.Si	84	385	0	0	384	1
Total			8245	33404	244	244	32824	90

Hasil akhir dari penginputan data evidence pada aplikasi Simbaga akan dapat menghasilkan capaian realisasi fisik dan keuangan setiap pelaksanaan sub kegiatan oleh masing-masing OPD seperti tabel berikut ini :

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT APBD PERUBAHAN Tahun 2022

Laporan Rekap Realisasi Fisik Dan Keuangan Per SKPD  
Kondisi realisasi sampai 31 Desember 2022

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Fisik			Keuangan			ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Fisik			Keuangan			ASISTEN ADMINISTRASI UMUM			Fisik			Keuangan		
	T	R	D	T	R	D	T	R	D	T	R	D	T	R	D	T	R	D	T	R	D	T	R	D
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100.00	98.38	-1.62	100.00	96.38	-3.62	100.00	96.38	-3.62	100.00	100.00	0.00	99.81	99.01	-0.80	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	97.74	-2.26
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100.00	93.26	-6.74	100.00	94.78	-5.22	100.00	94.78	-5.22	100.00	98.32	-1.68	100.00	98.17	-1.83	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	94.95	-5.05
BIRO HUKUM	96.97	99.75	2.78	100.00	81.03	-18.97	100.00	81.03	-18.97	100.00	100.00	0.00	100.00	96.95	-3.05	100.00	100.00	0.00	94.87	95.51	0.64	100.00	95.12	-4.87
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	100.00	95.89	-4.11	100.00	91.58	-8.42	100.00	91.58	-8.42	100.00	96.09	-3.91	100.00	94.69	-5.31	100.00	100.00	0.00	100.00	84.10	-15.90	100.00	82.34	-17.66
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	100.00	97.71	-2.29	100.00	98.09	-1.91	100.00	98.09	-1.91	100.00	99.22	-0.78	100.00	95.85	-4.15	100.00	100.00	0.00	100.00	98.23	-1.77	100.00	98.65	-1.35
DINAS KEBUDAYAAN	100.00	100.00	0.00	99.64	96.28	-3.36	100.00	96.28	-3.36	100.00	99.22	-0.78	100.00	95.85	-4.15	100.00	100.00	0.00	100.00	98.23	-1.77	100.00	98.65	-1.35
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.00	100.00	0.00	100.00	98.35	-1.65	100.00	98.35	-1.65	100.00	99.22	-0.78	100.00	95.85	-4.15	100.00	100.00	0.00	100.00	98.23	-1.77	100.00	98.65	-1.35
DINAS KESEHATAN	94.83	90.30	-4.53	99.87	90.22	-9.65	100.00	90.22	-9.65	100.00	82.80	-17.20	99.92	91.95	-7.97	100.00	100.00	0.00	100.00	98.23	-1.77	100.00	98.65	-1.35
DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100.00	98.69	-1.31	100.16	97.92	-2.24	100.00	97.92	-2.24	100.00	97.76	-0.24	100.00	96.83	-3.17	100.00	100.00	0.00	100.00	99.55	-0.45	100.00	99.22	-0.78
DINAS PEMERIDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100.00	100.00	0.00	96.22	95.84	-0.38	100.00	95.84	-0.38	100.00	100.00	0.00	97.77	96.83	-0.98	100.00	100.00	0.00	100.00	99.55	-0.45	100.00	99.22	-0.78
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	100.00	99.96	-0.04	100.00	93.20	-6.80	100.00	93.20	-6.80	100.00	100.00	0.00	100.00	96.83	-3.17	100.00	100.00	0.00	100.00	99.55	-0.45	100.00	99.22	-0.78
DINAS PENDIDIKAN	100.00	87.04	-12.96	100.00	95.93	-4.07	100.00	95.93	-4.07	100.00	100.00	0.00	97.77	96.83	-0.98	100.00	100.00	0.00	100.00	99.55	-0.45	100.00	99.22	-0.78
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.00	99.86	-0.14	100.00	98.09	-1.91	100.00	98.09	-1.91	100.00	96.67	-0.16	100.00	95.11	-4.89	100.00	100.00	0.00	100.00	99.55	-0.45	100.00	99.22	-0.78
DINAS SOSIAL	100.00	93.02	-6.98	100.00	97.46	-2.54	100.00	97.46	-2.54	100.00	100.00	0.00	100.00	94.42	-5.58	100.00	100.00	0.00	100.00	99.55	-0.45	100.00	99.22	-0.78
RUMAH SAKIT IRTA PROF. H.B. SHAHIN	100.00	98.33	-1.67	100.00	96.46	-3.54	100.00	96.46	-3.54	100.00	100.00	0.00	100.00	96.83	-3.17	100.00	100.00	0.00	100.00	99.55	-0.45	100.00	99.22	-0.78
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. AHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	100.00	100.00	0.00	100.00	98.66	-1.34	100.00	98.66	-1.34	100.00	91.39	-8.61	100.00	95.87	-4.13	100.00	100.00	0.00	100.00	99.55	-0.45	100.00	99.22	-0.78
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	100.00	99.17	-0.83	100.00	70.23	-29.77	100.00	70.23	-29.77	100.00	83.71	-16.29	100.02	98.43	-1.59	100.00	100.00	0.00	100.00	99.55	-0.45	100.00	99.22	-0.78
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIMAN	100.00	97.75	-2.25	100.00	98.54	-1.46	100.00	98.54	-1.46	100.00	98.00	-1.80	100.00	95.47	-4.53	100.00	100.00	0.00	100.00	99.55	-0.45	100.00	99.22	-0.78
Rata - rata	99.54	97.17	-2.37	99.97	94.39	-5.58	100.00	94.39	-5.58	100.00	94.53	-4.84	99.68	89.43	-11.25	100.00	100.00	0.00	99.68	97.92	-1.76	100.00	97.27	-2.73

Statistika Data Deviasi SKPD :

Keterangan	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA			ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			ASISTEN ADMINISTRASI UMUM			Total		
	Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan	
Deviasi Diatas -10%	1	2	3	3	3	1	1	1	5	6		
Deviasi Antara 5% sampai 10%	2	4	3	4	4	0	5	5	13			
Deviasi Dibawah -5%	15	12	12	11	11	15	10	10	42	33		
Total Data							16	16		52		

Pencapaian / Rata Rata Pemprov Sumbar :

Fisik	Keuangan		
	T	R	D
	99.52	96.49	-3.03
			99.92
			93.92
			-6.00

Keterangan :

T : Target  
R : Realisasi  
D : Deviasi  
Deviasi diatas -10%  
Deviasi antara 5% sampai 10%  
Deviasi dibawah -5%

- b. Indikator kinerja **Persentase Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan** dapat dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan oleh masing-masing Kabupaten/Kota ke Biro Administrasi Pembangunan yang dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Tahun 2022 ini Biro Administrasi Pembangunan baru bisa melakukan **“Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan Tepat Waktu Dalam Penyampaian Administrasi Pembangunan oleh Kabupaten/Kota Ke Biro Administrasi Pembangunan”**. Kondisi tersebut disebabkan karena aplikasi Simbangda saat ini masih tahap pengenalan dan replikasi di Kabupaten/Kota, jadi belum bisa dilakukan seperti kondisi di Provinsi. Tertib administrasi pelaksanaan pembangunan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota dilihat dari ketepatan waktu penyampaian laporan ke Provinsi setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.3.3 menampilkan perbandingan target dan realisasi Capaian kinerja Tahun 2021 dan 2022

**Tabel 3.3.3**

**Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 dan 2022**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Renstra	Target		Realisasi		Capaian (%)		Ket
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	NA	90	91	PD : 98,29 Kab/Kota : 100	PD : 98,26 Kab/Kota : 100	109,21 111,11	107,98 109,89	
Jumlah Capaian .....							220.32	217.87	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja .....							110.16	108.94	
<b>Kriteria Penilaian</b>							<b>Sangat Baik</b>		

\*Tidak ada target kinerja nasional yang diamanatkan.

Hasil capaian indikator kinerja Tahun 2022 mencapai 108,94% mengalami sedikit penurunan dari pada tahun 2021 mencapai 110,16%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 terdapat beberapa keterlambatan capaian proses tertib administrasi akibat dari peralihan sistem pelaporan berbasis eviden pada Kabupaten/Kota yang melaksanakan replikasi.

Sebagai penunjang kegiatan Biro Administrasi Pembangunan didukung dengan anggaran sebagai berikut :

**Tabel 3.3.4**  
**Realisasi Anggaran Program Administrasi Pembangunan Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	<b>KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Rp. 2.203.583.00,-</b>	<b>Rp. 2.177.755.060,-</b>	<b>98,83</b>
<b>I</b>	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp. 1.355.758.500,-</b>	<b>Rp. 1.341.416.286,-</b>	<b>98,94</b>
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp. 329.785.000,-	Rp. 322.658.655,-	97,84
2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp. 319.295.500,-	Rp. 317.742.363,-	99,51
3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp. 705.678.000,-	Rp. 701.015.268,-	99,20
<b>II</b>	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp. 847.824.500,-</b>	<b>Rp. 836.338.774,-</b>	<b>98,65</b>
1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp. 105.820.500,-	Rp. 104.565.827,-	98,81
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 482.835.000,-	Rp. 479.966.155,-	99,41
3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp. 259.169.000,-	Rp. 251.806.792,-	97,51

Dari tabel 3.3.4 secara keseluruhan Program Administrasi Pembangunan realisasi keuangannya 98,83% dengan artian melebihi dari target keuangan indikator program 91% serta dengan realisasi fisiknya 100%.

### **Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2**

#### ***MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI***

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menjadi pondasi penting di dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional, dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan utuh.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan memiliki makna yang antara lain ditandai dengan

kemampuan melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara professional dan handal serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan manajemen pemerintahan.

Sehubungan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya telah melakukan suatu perencanaan yang terangkum dalam suatu perencanaan strategis yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat suatu sasaran strategis yang berkaitan kepada Tata Kelola Organisasi.

Tata kelola organisasi pemerintah daerah berdasarkan reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implementasi serta adanya komunikasi antar kelembagaan dengan indikator :

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan kepada evaluasi laporan kinerja tahun 2021 terhadap pemakaian anggaran tahun 2021, Biro Administrasi Pembangunan memperoleh nilai 60,08 dengan kategori B dengan pengertian Baik, dimana akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Untuk tahun 2022 Biro Administrasi Pembangunan menargetkan B dengan nilai 61 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.3.5.**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B(61)	B(60,08)	98,49

2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 sesuai dengan perencanaan Biro Administrasi Pembangunan terdapat 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh lima) sub kegiatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi biro. Jumlah anggaran yang tersedia Rp. 3.338.444.003,- dengan realisasi Rp. 3.304.469.718,- atau dengan besaran persentase realisasi keuangan **98,98%** dan realisasi fisik **100%**.

Selanjutnya kegiatan dan anggaran yang pendukung sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.6**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>Rp. 3.338.444.003</b>	<b>Rp. 3.304.469.718,-</b>	<b>98,98</b>
I	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Rp. 1.134.861.003,-</b>	<b>Rp. 1.126.714.658,-</b>	<b>99,28</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 37.988.000,-</b>	<b>Rp. 37.927.500,-</b>	<b>99,84</b>
1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 21.475.000,-	Rp. 21.433.000,-	99,80
1.b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 16.513.000,-	Rp. 16.494.500,-	99,89
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 75.285.000,-</b>	<b>Rp. 75.253.000,-</b>	<b>99,96</b>
2.a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 62.225.000,-	Rp. 62.225.000,-	100
2.b	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 13.060.000,-	Rp. 13.028.000,-	99,75
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 18.800.000,-</b>	<b>Rp. 18.800.000,-</b>	<b>100</b>
3.a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 18.800.000,-	Rp. 18.800.000,-	100
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 45.339.600,-</b>	<b>Rp. 45.277.900,-</b>	<b>99,86</b>
4.a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 45.339.600,-	Rp. 45.277.900,-	99,86
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 736.531.203,-</b>	<b>Rp. 734.227.384,-</b>	<b>99,69</b>
5.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 128.845.910,-	Rp. 128.000.000,-	99,34
5.b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 39.062.290,-	Rp. 39.062.290,-	100
5.c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 18.369.500,-	Rp. 18.369.500,-	100

5.d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 5.200.000,-	Rp. 4.201.000,-	80,79
5.e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 545.053.503,-	Rp. 544.594.594,-	99,92
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 35.600.000,-</b>	<b>Rp. 34.890.000,-</b>	<b>98,01</b>
6.a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Rp. 35.600.000,-	Rp. 34.890.000,-	98,01
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 75.887.850,-</b>	<b>Rp. 72.815.366,-</b>	<b>95,95</b>
7.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 74.386.350,-	Rp. 72.815.366,-	97,89
7.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.501.500,-	Rp. 0.00,-	0,00
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 109.429.350,-</b>	<b>Rp. 107.523.508,-</b>	<b>98,26</b>
8.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenadaraan Dinas Jabatan	Rp. 49.190.000,-	Rp. 47.718.800,-	97,01
8.b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 47.774.350,-	Rp. 47.339.708,-	99,09
8.c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 12.465.000,-	Rp. 12.465.000,-	100
II	<b>KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Rp. 2.203.583.000,-</b>	<b>Rp. 2.177.755.060,-</b>	<b>98,83</b>
1	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp. 1.355.758.500,-</b>	<b>Rp. 1.341.416.286,-</b>	<b>98,94</b>
1.a	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp. 329.785.000,-	Rp. 322.658.655,-	97,84
2.b	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp. 319.295.500,-	Rp. 317.742.363,-	99,51
3.c	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp. 706.678.000,-	Rp. 701.015.268,-	99,20
2	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp. 847.824.500,-</b>	<b>Rp. 836.338.774,-</b>	<b>98,65</b>
2.a	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp. 105.820.500,-	Rp. 104.565.827,-	98,81
2.b	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 482.835.000,-	Rp. 479.966.155,-	99,41
2.c	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp. 259.169.000,-	Rp. 251.806.792,-	97,16

**Tabel 3.3.7**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 2**  
**Tahun 2021 dan 2022**

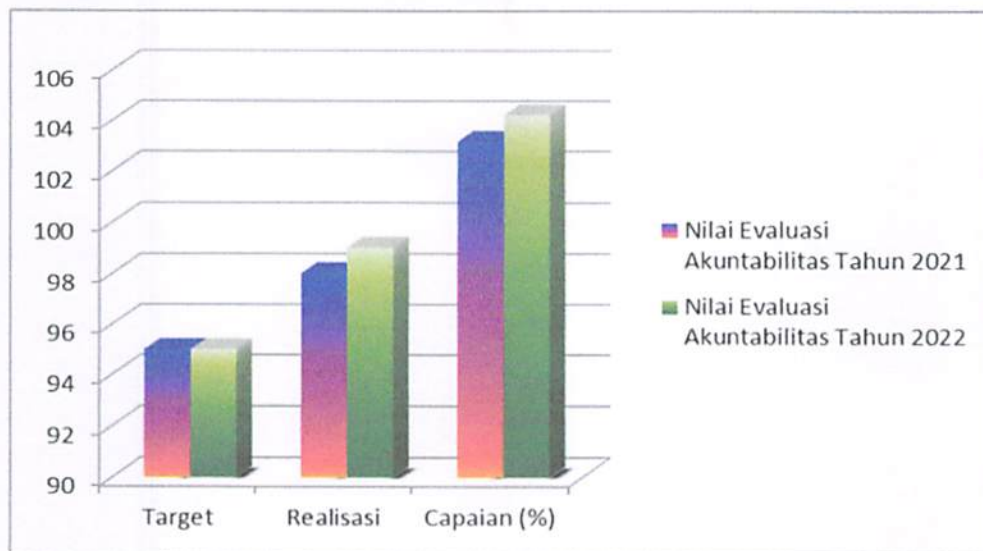
NO.	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		KET
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NILAI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	NA	95	95	98.01	98.98	103.16	104.19	
RATA-RATA 2021 DAN 2022							103.16	104.19	
KRITERIA PENILAIAN							SANGAT BERHASIL		

Dari tabel 3.3.7 dapat dilihat hasil capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 terhadap realisasi tahun 2022 dan tahun 2021, serta dibandingkan antara realisasi dengan target untuk Tahun 2021 dan tahun 2022. Dari tabel di atas diperoleh capaian rata-rata realisasi keuangan tahun 2022 sebesar 104,19 % lebih meningkat dari tahun 2021 dan dapat diartikan bahwa capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi lebih dari capaian rata-rata yang 100% dengan kriteria penilaian **Sangat Berhasil**

Dalam mewujudkan capaian target indikator kinerja dengan 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi pengukuran capaian kinerja adalah yang tertuang dalam Renstra 2021-2026, dimana tahun 2022 mendapat alokasi anggaran dalam DPA/DPPA Biro Administrasi Pembangunan sebesar Rp. 3.338.444.003,- dengan realisasi Rp. 3.304.469.718 sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.7 diatas.

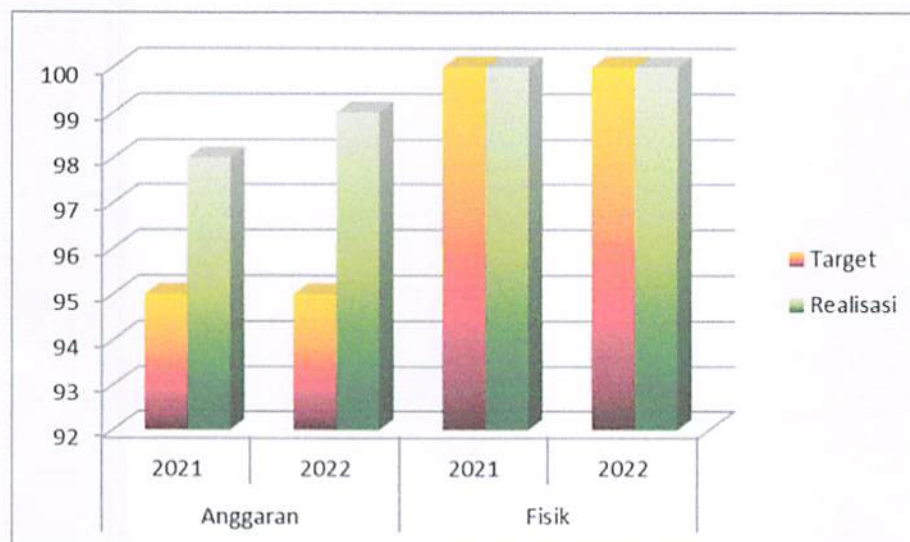
Adapun realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada grafik 1 (satu) dibawah ini :

**Grafik 2**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan**



Berdasarkan kepada tingkat realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat perbandingan realisasi anggaran dan fisik 2021 dan 2022 pada grafik 3 dibawah ini :

**Grafik 3**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik**  
**Tahun 2021 dan 2022**



## **Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2**

### ***MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI***

## **Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3**

### ***MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI***

Pengukuran kualitas pelayanan organisasi pada Biro Administrasi Pembangunan dilakukan dengan menyerahkan kuisisioner kepada Perangkat Daerah ( OPD Provinsi ) dan Kabupaten/Kota sebagai OPD yang dilayani oleh Biro Administrasi Pembangunan. Adapun jumlah Kuisisioner yang disampaikan berjumlah 10 pertanyaan.

Responden yang diberikan kuisisioner dibagikan kepada 50 OPD Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota. Dari kuisisioner yang diberikan dapat dilakukan rekapitulasi sebagai bahan untuk memperoleh nilai tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan Biro. Adapun beberapa unsur yang dipertanyakan pada kuisisioner sebagai berikut :

- a. Prosedur pelayanan
- b. Persyaratan dan jenis pelayanan
- c. Kesesuaian persyaratan
- d. Kejelasan informasi
- e. Jumlah personil yang melayani
- f. Sarana pendukung dstnya

Dari unsur pertanyaan yang dijawab pada kuisisioner tersebut akan memperoleh hasil responden kuisisioner yang akan dipergunakan sebagai indikator kinerja biro. Responden yang menyerahkan kembali lembaran kuisisioner berjumlah 40 lembar dengan rincian sebagai berikut :

- a. OPD Provinsi 50 kuisisioner mengembalikan 30
- b. Kabupaten/Kota 19 kuisisioner mengembalikan 10

Sehingga diperoleh rekapitulasi kuisisioner yang disebarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.3.8**  
**Tabel Rekapitulasi Kuisisioner**

NO.	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RESPONDEN	JUMLAH NILAI
1	24	44	1,056
2	11	32	352
3	5	29	145
<b>TOTAL NILAI</b>			<b>1,553</b>

Total Nilai Pertanyaan 44 (nilai maksimal) X responden = 1.760

$$\text{NILAI IKM} = \frac{1.553}{1.760} \times 100\% = 88.23$$

Dari perhitungan nilai IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) tersebut dapat di buat tabel Tingkat kepuasan Pelayanan Organisasi sebagai berikut :

**Tabel 3.3.9**

**Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi**

NO.	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
			2022	2022	2022	
1	2	3	5	7	9	10
1	TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN ORGANISASI	NA	80	88.23	110.28	
RATA-RATA 2022					110.28	
KRITERIA PENILAIAN					SANGAT BAIK	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil capaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan bernilai **110,28% dengan artian Sangat Baik.**

TABEL 3.3.10

## HASIL KUISIONER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas untuk tahun 2022 Biro Administrasi Pembangunan secara keseluruhan pencapaian kinerja Tahun 2022 dapat disimpulkan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja yang pelaksanaannya Bulan Januari s.d Desember 2022 dengan hasil capaian kinerja sebesar **106,66%**
2. Usaha yang dilakukan dalam rangka dalam rangka mewujudkan indikator kinerja terhadap ***Persentase Perangkat Daerah Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan*** adalah dengan menerapkan penggunaan aplikasi Simbangda bagi seluruh OPD Provinsi agar dapat terlaksanannya tertib administrasi pembangunan yang mana seluruh OPD malakukan tahapan upload dokumen sebagai data dukung dan ketepatan waktu melaksanakan tertib pelaksanaan administrasi pembangunan.
3. Usaha yang dilakukan dalam rangka dalam rangka mewujudkan indikator kinerja terhadap ***Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan*** melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota untuk dapat menyerahkan laporan pelaksanaan pembangunannya dengan tepat waktu.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2022. Dengan kata lain

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

#### **4.2 Permasalahan dan Kendala**

Pencapaian kinerja untuk tahun 2022 terhadap pelaksanaan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan terhadap anggaran yang disesuaikan dengan Perjajian Kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang dialami selama tahun 2022 antara lain :

- a. Perlunya memperbarui beberapa peraturan terkait pembangunan di Sumatera Barat seperti peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, peraturan tentang pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan lewat tahun anggaran, peraturan tentang proyek strategis/tahun jamak. Sehingga ada kepastian hukum dan pegangan bagi pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- b. Monev yang dilaksanakan hanya menyentuh sebagian kecil dari paket pekerjaan yang ada. Sehingga untuk mengambil kesimpulan dengan sampel yang sedikit itu tentunya kurang valid. Sehingga kedepannya perlu peningkatan jumlah sampel monev yang dilaksanakan dengan tujuan mengurangi faktor kesalahan dalam mengambil kesimpulan masalah-masalah pembangunan.
- c. Kurangnya sarana mobilitas sangat berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan. Idealnya monev yang dilaksanakan selain yang terencana dengan melibatkan SKPD terkait sewaktu-waktu juga perlu dilaksanakan

Sidak. Sehingga dapat dilihat kondisi asli dilapangan seperti apa. Hal ini tentunya harus didukung oleh sarana mobilitas yang ideal dalam pelaksanaannya.

- d. Perlu adanya sinkronisasi dari beberapa OPD dalam pengendalian pelaksanaan sebuah kegiatan baik dalam sisi pelapooan pelaksanaan kegiatan, terutama sinkronisasi data realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana perimbangan.
- e. Perlu adanya perencanaan yang matang dari OPD dalam melaksanakan kegiatan, terutama OPD yang memiliki sumber dana dari APBD dan APBN agar ada time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi padatnya pelaksanaan kegiatan diakhir tahun anggaran.
- f. Terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output.
- g. Pada umumnya SKPD belum mengentrykan permasalahan dan rencana tindak lanjut di dalam sistem
- h. Data yang dilaporkan pada Aplikasi Simbangda agar updadte dan valid
- i. Belum optimalnya penyelesaian proses lelang karena adanya review HPS untuk pekerjaan Kontruksi.
- j. Masih adanya keterlambatan DAK yang belum selesai akibat kelalaian dari SKPD sehingga mengakibatkan kerugian pada daerah
- k. Belum lengkapnya dokumen/bukti yang harus diupload kedalam system
- l. Masih adanya kegiatan yang belum terlaksana dan proses tender yang belum keluar izinnya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.
- m. Terkait Adanya Sub Kegiatan baru yang tidak dapat diinput karena OPD belum mengetahui tata cara entry kegiatan tambahan.
- n. Sehubungan adanya perbedaan realisasi fisik dan realisasi keuangan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan perhitungan total realisasi antar fisik dan keuangan, dan sudah dilakukan rumusan dengan pemberian

- bobot terhadap realisasi fisik maupun realisasi keuangan, sehingga terdapat keseimbangan terhadap realisasi fisik maupun keuangan.
- o. Terkait adanya OPD yang merubah paket kegiatan menjadi rutin, sehingga perlu dilakukan penguncian terhadap kegiatan tertentu termasuk kegiatan pada program penunjang pemerintah pada anggaran rutin.
  - p. Terkait adanya penyatuan paket kegiatan yang seharusnya tidak disatukan.

Dari masalah yang disampaikan diatas dapat juga memperlambat proses pelaksanaan aplikasi Simbangda pada masing-masing OPD sehingga dapat memperlambat pelaksanaan proses tertib administrasi pembangunan. Karena keterlambatan dalam proses upload data ke aplikasi Simbangda menyebabkan lambatnya semua proses administrasi.

## DOKUMENTASI SUB KEGIATAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBN TAHUN 2022



Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan, 30 Agustus 2022 di Balcone Hotel





Rapat Pengendalian kegiatan APBN di Sumatera Barat bersama Satker Kementerian/Lembaga





**Monev Pelaksanaan Pembangunan APBN di Sumatera Barat Tahun 2022**





**Rapat Pengendalian DAK Fisik Tahun 2022**



## Kabupaten Solok Selatan



Pertemuan dengan Sekda dan  
Kabag AP Solsel



Pertemuan Tim Monev BKK Provinsi  
dengan Wakil Bupati dan Tim Monev  
BKK Solsel

## Kabupaten Sijunjung



Rapat Evaluasi sekaligus Monev BKK ke Program Strategis Kabupaten Sijunjung

## Kota Bukittinggi



Monev Dana BKK Provinsi untuk Kegiatan Pariwisata



Pertemuan dengan Pengelola SMAN 2 terkait dana BKK Pendidikan Kota Bukittinggi



Pertemuan dengan Pengelola SMKN 2 terkait dana BKK Pendidikan Kota Bukittinggi

## Kabupaten Lima Puluh Kota



Rapat dengan Tim Monev  
BKK Kabupaten Lima  
Puluh Kota



Kunjungan Lapangan  
dengan Tim Monev BKK  
Kabupaten Lima Puluh  
Kota ke Harau



Kunjungan Lapangan  
dengan Tim Monev BKK  
Kabupaten Lima Puluh  
Kota ke Batas Kabupaten  
dengan Kota  
Payakumbuh

## Kabupaten Pasaman



Rapat dengan Tim Monev  
BKK Kabupaten  
Pasaman



Berfoto Bersama dengan  
Tim Monev BKK  
Kabupaten Pasaman



Kunjungan ke Kawasan  
Equator, Pasaman

## Kota Solok



Rapat dan Makan  
Siang Bersama  
dengan Tim Monev  
BKK Kota Solok



Kunjungan Lapangan  
ke Stadion Marahadin  
Kota Solok



Pertemuan dengan  
Pelaksana  
Pembangunan  
Stadion Marahadin  
Kota Solok



Kunjungan Lapangan  
ke Kawasan Wisata  
Belibis Kota Solok

## Kabupaten Solok



Pertemuan dengan Tim  
Monev BKK Kabupaten Solok



Kunjungan Lapangan ke  
Kawasan TIC Kabupaten  
Solok



Kunjungan Lapangan ke  
Jalan Arian Kabupaten  
Solok

## Kota Pariaman



Tim Monev Provinsi dan Tim Monev BKK Kota Pariaman di Balaikota Pariaman



Pertemuan antara Tim Monev Provinsi dan Kota Pariaman dengan Pengelola SMKN 2 Pariaman



Tim Monev Provinsi dan Kota Pariaman dengan Pengelola SMAN 5 Pariaman

## Kota Sawahlunto



Pertemuan dengan Tim Monev BKK Kota Sawahlunto



Kunjungan Lapangan ke Kawasan Kandih Kota Sawahlunto

## Kabupaten Tanah Datar

---



Pertemuan dengan Tim  
Money BKK Kabupaten  
Tanah Datar



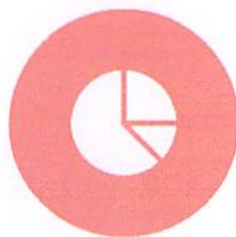
Berfoto bersama dengan Tim  
Money BKK Kabupaten  
Tanah Datar



Kunjungan Lapangan ke  
Geopark Singkarak di  
Kabupaten Tanah Datar

---

Sekian



TERIMA KASIH

**DOKUMENTASI KEGIATAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
TAHUN 2022**



II.26. Rekonsiliasi TW III )



II.27. Rekonsiliasi TW IV (APBD  
Perubahan)

**Dokumentasi Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)**  
**Tanggal 13 s.d 14 Juni 2022**

